

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran yang tinggi menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraannya. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Baeti, 2013).

Pembangunan manusia merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan di suatu Negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang dibutuhkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri terdiri dari tiga pilar, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Karena

pengembangan sumber daya manusia (SDM) memiliki kapasitas yang besar untuk kemajuan negara (Oluwatobi dan Ogunrinola, 2011).

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Baeti, 2013).

Posisi peringkat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah merupakan akumulasi dari total angka Indeks Pembangunan Manusia pada level Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Per Kabupaten/Kota (2010-2016)

Wilayah Jateng	Indeks Pembangunan Manusia (metode baru)						
	Indeks Pembangunan Manusia						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PROVINSI JAWA TENGAH	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98
Kabupaten Cilacap	64.18	64.73	65.72	66.8	67.25	67.77	68.6
Kabupaten Banyumas	66.87	67.45	68.06	68.55	69.25	69.89	70.49
Kabupaten Purbalingga	63.61	64.33	64.94	65.53	66.23	67.03	67.48
Kabupaten Banjarnegara	60.7	61.58	62.29	62.84	63.15	64.73	65.52
Kabupaten Kebumen	63.08	64.05	64.47	64.86	65.67	66.87	67.41
Kabupaten Purworejo	68.16	69.11	69.4	69.77	70.12	70.37	70.66
Kabupaten Wonosobo	62.5	63.07	64.18	64.57	65.2	65.7	66.19
Kabupaten Magelang	63.28	64.16	64.75	65.86	66.35	67.13	67.85
Kabupaten Boyolali	68.76	69.14	69.51	69.81	70.34	71.74	72.18
Kabupaten Klaten	70.76	71.16	71.71	72.42	73.19	73.81	73.97
Kabupaten Sukoharjo	71.53	72.34	72.81	73.22	73.76	74.53	75.06
Kabupaten Wonogiri	63.9	64.75	65.75	66.4	66.77	67.76	68.23
Kabupaten Karanganyar	70.31	71	72.26	73.33	73.89	74.26	74.9
Kabupaten Sragen	67.67	68.12	68.91	69.95	70.52	71.1	71.43
Kabupaten Grobogan	64.56	65.41	66.39	67.43	67.77	68.05	68.52
Kabupaten Blora	63.02	63.88	64.7	65.37	65.84	66.22	66.61
Kabupaten Rembang	64.53	65.36	66.03	66.84	67.4	68.18	68.6
Kabupaten Pati	65.13	65.71	66.13	66.47	66.99	68.51	69.03
Kabupaten Kudus	69.22	69.89	70.57	71.58	72	72.72	72.94
Kabupaten Jepara	66.76	67.63	68.45	69.11	69.61	70.02	70.25
Kabupaten Demak	66.02	66.84	67.55	68.38	68.95	69.75	70.1
Kabupaten Semarang	69.58	70.35	70.88	71.29	71.65	71.89	72.4
Kabupaten Temanggung	63.08	64.14	64.91	65.52	65.97	67.07	67.6
Kabupaten Kendal	66.23	66.96	67.55	67.98	68.46	69.57	70.11
Kabupaten Batang	61.64	62.59	63.09	63.6	64.07	65.46	66.38
Kabupaten Pekalongan	63.75	64.72	65.33	66.26	66.98	67.4	67.71
Kabupaten Pemasang	58.64	59.66	60.78	61.81	62.35	63.7	64.17
Kabupaten Tegal	61.14	61.97	62.67	63.5	64.1	65.04	65.84
Kabupaten Brebes	59.49	60.51	60.92	61.87	62.55	63.18	63.98
Kota Magelang	73.99	74.47	75	75.29	75.79	76.39	77.16
Kota Surakarta	77.45	78	78.44	78.89	79.34	80.14	80.76
Kota Salatiga	78.35	78.76	79.1	79.37	79.98	80.96	81.14
Kota Semarang	76.96	77.58	78.04	78.68	79.24	80.23	81.19
Kota Pekalongan	68.95	69.54	69.95	70.82	71.53	72.69	73.32
Kota Tegal	69.33	70.03	70.68	71.44	72.2	72.96	73.55

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1.1 Pembangunan manusia di Jawa Tengah pada tahun 2016 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah. Pada tahun 2016, IPM Jawa Tengah telah mencapai 69,98, angka ini meningkat sebesar 0,49 poin dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah pada tahun 2015 yang sebesar 69,49.

Dalam meningkatkan pembangunan manusia di Jawa Tengah, pendidikan dan kesehatan individu penduduk juga merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pembangunan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju. Adapun Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 1.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (dalam rupiah)

Kab/Kota	Pendidikan	Kesehatan
Prov. Jawa Tengah	63,866,768,543	684,291,595,945
Kab. Banjarnegara	1,416,880,218,982	399,150,617,764
Kab. Banyumas	1.362.800.000.000	233.442.605.876
Kab. Batang	505,999,695,887	233,344,230,477
Kab. Blora	698,827,447,915	295,686,629,627
Kab. Boyolali	180,409,054,686	66,837,885,256
Kab. Brebes	914,141,399,267	487,971,798,293
Kab. Cilacap	1,102,472,316,563	446,652,943,386
Kab. Demak	613,340,709,034	268,262,113,306
Kab. Grobogan	729,528,274,694	345,572,824,617
Kab. Jepara	466,949,441,367	283,753,263,046
Kab. Karanganyar	129,135,845,331	78,837,118,265
Kab. Kebumen	167,359,892,347	112,299,361,574
Kab. Kendal	695,793,369,106	311,773,169,869
Kab. Klaten	1,011,690,040,754	240,506,108,327
Kab. Kudus	646,897,817,359	372,620,166,534
Kab. Magelang	735,547,046,898	266,797,166,571
Kab. Pati	855,367,036,080	421,024,129,801
Kab. Pekalongan	554,303,646,573	241,782,049,969
Kab. Pemasang	815,911,807,837	297,122,265,510
Kab. Purbalingga	635,052,014,640	304,091,429,000
Kab. Purworejo	684,773,220,593	296,122,790,731
Kab. Rembang	123,614,626,493	71,015,214,912
Kab. Semarang	686,210,573,781	335,197,007,659
Kab. Sragen	762,821,252,299	334,887,017,803
Kab. Sukoharjo	724,286,923,843	159,643,455,803
Kab. Tegal	112,839,323,847	17,795,785,091
Kab. Temanggung	17,349,049,752	19,611,115,690
Kab. Wonogiri	617,340,083,464	79,205,222,725
Kab. Wonosobo	585,811,348,136	195,214,402,269
Kota Magelang	44,693,937,111	77,638,560,862
Kota Pekalongan	243,238,077,344	81,384,098,366
Kota Salatiga	217,151,437,090	231,671,340,273
Kota Semarang	1,068,293,079,087	528,567,996,299
Kota Surakarta	666,857,864,671	156,395,870,387
Kota Tegal	304,702,885,621	278,946,650,523

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah

Berdasarkan Tabel 1.2 Jelas mendiskripsikan belanja pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan terus meningkat. Ini merupakan hal positif bagi masyarakat Jawa Tengah dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua dari beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia. Kedua faktor tersebut, merupakan layanan jasa yang normatifnya disediakan oleh pemerintah, bukan bertumpu pada swasta terlebih pasar. Dalam hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah disektor tersebut maka akan meningkatkan prioduktivitas penduduk sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia. Untuk selanjutnya, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat disebut sebagai investasi publik (Astri dkk, 2013).

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jateng, tidak hanya berhenti pada meningkatnya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Karena terdapat permasalahan lain yang juga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, yaitu rendahnya produktivitas dari masyarakatnya itu sendiri. Rendahnya produktivitas masyarakat dapat berimbas pada pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) dan memperlambat pertumbuhan yang berujung pada rendahnya pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah bahkan di Indonesia.

Masalah pembangunan manusia khususnya di Indonesia banyak di perbincangan publik. Isu pembangunan manusia merupakan isu sentral yang memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang lebih menekan pada pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan dan kebutuhan dasar.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai pentingnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan sebagai keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia, peneliti tertarik ingin meneliti lebih jauh bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di 35 Kabupaten/KotaProinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

B. Perumusan masalah

Dalam penelitian ini, ada beberapa pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pemenuhan syarat kelulusan bagi penulis.
2. Dapat menambah literatur ilmiah mengenai kajian dan penelitian tentang pembangunan manusia.
3. Menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dalam sektor pengeluaran pemerintah dalam rangka memaksimalkan kontribusi dan efektivitas pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia.

E. Metode Penelitian

1. Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) (Syalkahfi, 2016) . Model umum dari analisis ini adalah :

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 SP_i + \beta_2 SK_i + \varepsilon$$

Keterangan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia, diukur dalam indeks

SP = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

SK = Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

β_0 = Intersep

β_i = Koefisien variabel bebas

i = *Cross Section*

ε = Variabel gangguan

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder, yang terdiri dari satu variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan dua variabel bebas yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, maupun sumber data sekunder lainnya. Jenis data yang digunakan adalah *cross section* dari 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori, penelitian sebelumnya kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pembahasan alat dan model analisis, data dan sumber data dan batasan variabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil estimasi, interpretasi kuantitatif dan interpretasi ekonomi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran